



Judul : Pembiayaan Puskesmas Rawan Diselewengkan	Wartawan : Maya Ayu Puspitasarimaya.puspitasari@tempo.co.id
Media : Koran Tempo	Nada Pemberitaan : Netral
Tanggal : 14-Feb-2018	NewsValue : 119784664
Halaman : 10	AdValue : 40726786



Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Sulistyowati, mengenakan baju tahanan setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta, 4 Februari lalu.

# Pembiayaan Puskesmas Rawan Diselewengkan

Besarnya pemasukan tidak diimbangi dengan pengelolaan yang transparan.

Maya Ayu Puspitasari  
maya.puspitasari@tempo.co.id

**JAKARTA** — Investigasi yang dilakukan Indonesia Corruption Watch menemukan 13 potensi penyelewengan dalam pengelolaan dana di pusat kesehatan masyarakat. Delapan temuan di antaranya berupa penggelapan pembiayaan kesehatan tingkat pertama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau dana kapitasi.

Peneliti dari ICW, Febri Hendri, mengatakan temuan tersebut merupakan hasil pemantauan lembaga bersama sejumlah kolompok masyarakat sipil antikorupsi di beberapa daerah terhadap 26 puskesmas di 14 provinsi sejak Maret hingga Agustus 2017. Rata-rata dana kapitasi yang diterima puskesmas tersebut mencapai Rp 400 juta per tahun, belum termasuk pendanaan lain berupa bantuan operasional kesehatan dan jaminan kesehatan daerah. "Kurangunya transparansi pengelolaan membuat kepala puskesmas bersama bendahara leluasa menyelewengkan dana kapitasi," kata Febri kemarin.

Pengelolaan dana secara tertutup dari pengawasan publik tak hanya terjadi ketika duit dibelanjakan, tapi dimulai sejak tahap perencanaan dan penganggaran. Keseluruhan proses tersebut juga dinilai tak

akuntabel.

Hasilnya, koalisi kelompok sipil menemukan sedikitnya dua kasus dugaan pemanfaatan dana kapitasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim juga menemukan kasus manipulasi bukti pencairan dan pertanggungjawaban dana kapitasi. Ada pula lima kasus penarikan biaya dari peserta jaminan kesehatan.

Febri menyebutkan potensi penyelewengan dana puskesmas ini meningkat karena rendahnya pendampingan dan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Inspektorat daerah, menurut Febri, selama ini tak menjadikan pengelolaan dana kapitasi sebagai program prioritas pengawasan mereka yang tecermin dari tak adanya program dan anggaran. "Termasuk tidak ada pemeriksaan jika mereka menerima laporan pemotongan atau penyimpangan dana kapitasi di puskesmas," ujarnya. Kondisi tersebut diperburuk oleh belum adanya sistem perlindungan terhadap pelapor.

Penyelewengan dana kapitasi mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Jombang Nyono Suhadi Wihandoko dan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Inna Sulistyowati, pekan lalu.

Inna diduga menyuap Nyono agar mengangkatnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan definitif. Rasuah tersebut menggunakan duit dana kapitasi yang ditilap dari 34 puskesmas.

Kepala Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nopi Hidayat sebelumnya mengatakan lembaganya tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian dana kapitasi. Meski begitu, menurut Nopi, BPJS Kesehatan rutin memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bersama pemangku kepentingan lain. "Sampai saat ini belum ada laporan

kasus pemotongan dana kapitasi yang tidak untuk peruntukannya," kata Nopi.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani enggan mengomentari hasil investigasi ICW lantaran belum mempelajari temuan-temuan tersebut. Dia menjelaskan, peran Kementerian dalam program Jaminan Kesehatan Nasional adalah menyusun regulasi. Penyelenggaraan dikelola BPJS Kesehatan. "Pengawasannya dilakukan dinas kesehatan daerah setempat bersama asosiasi fasilitas kesehatan dan organisasi profesi," kata Kalsum. •



Judul : Kemenkes Rekomendasikan Layanan Rumah Gizi di Asmat   Koran Jakarta	
Media : koran-jakarta.com	Wartawan : koran Jakarta
Tanggal : 12-Feb-2018	Nada Pemberitaan : Netral
Halaman : 1	NewsValue : 119784664
	AdValue : 40726786

JAKARTA – Untuk mencegah terulangnya kasus kejadian luar biasa (KLB) gizi, tim kesehatan Kementerian Kesehatan merekomendasikan layanan rumah gizi. Layanan ini guna pemantauan kondisi gizi masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Asmat.

Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kamaruzzaman, mengatakan rumah gizi atau Therapeutic Feeding Centre (TFC) telah dibentuk di Aula GPI di Asmat sejak 19 Januari 2018 sudah menjalankan pelayanan pemantauan gizi.

Kamaruzzaman mengatakan rumah gizi tersebut hanya percontohan dan untuk selanjutnya dibentuk rumah gizi sesungguhnya dengan perawatan dan pemantauan kondisi pasien gizi buruk.

Pasien rawat diberikan terapi nutrisi, diperiksa kenaikan berat badannya, dipantau toleransi minumannya, dan dipantau klinis gizi buruknya.

“Semoga TFC ini menjadi awal dari solusi untuk mengatasi gizi buruk di Papua, khususnya di Kabupaten Asmat,” kata salah satu anggota tim Flying Health Care (FHC) dari RSCM, Cut Nurul Hafifah.

Tim kesehatan Kementerian Kesehatan dikirimkan dalam tiga gelombang, tiap satu gelombang bertugas 10 hari masa bakti. Per hari ini tim kesehatan Kemenkes telah menyelesaikan tugas dan memberikan rekomendasi untuk kesehatan berkelanjutan di Kabupaten Asmat.

Melihat semua kondisi ini, rekomendasi FHC III di antaranya perlu meningkatkan imunisasi dasar lengkap, kebutuhan SDM untuk di rumah sakit dan Puskesmas dipenuhi, pendampingan pemulihan gizi serta penguatan sistem pengelolaan rumah sakit dan Puskesmas, terang Kamaruzzaman.

Tim FHC III yang telah habis masa baktinya hingga per 10 hari terhitung hari ini, juga telah membentuk poli gizi di RSUD Agats. Dengan begitu terapi khusus metabolik anak gizi buruk maupun kurang gizi berkesinambungan bisa dilakukan di RSUD Agats. cit/E-3